



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

LAPORAN KEUANGAN

SEMESTER I 2026

BAGIAN ANGGARAN 005.05.403429

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN

MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2026

JL. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov
Bangka Belitung

Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telp. 0717-9111513
e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG 403429

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2026
Semester I 2026

BAGIAN ANGGARAN 005.05
DIRJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung
Telp. 0717-9111513 PANGKALPINANG - Babel 403429
e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Semester I 2026 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (**good governance**).

Pangkalpinang, 30 Juni 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M.

NIP. 198112292006042015

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan.....	01
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	04
II. Neraca.....	05
III. Laporan Operasional.....	06
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	07
V. Laporan Keuangan Tertentu dan Informasi Penting Lainnya.....	08
VI. Catatan atas Laporan Keuangan.....	09
A. Penjelasan Umum.....	09
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.....	09
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	10
A.3. Basis Akuntansi.....	10
A.4. Dasar Pengukuran.....	11
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	20
B.1. Pendapatan.....	21
B.2. Belanja.....	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	24
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	24
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan.....	24
C.3. Persediaan.....	24
C.4. Peralatan dan Mesin.....	25
C.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	25
C.6. Uang Muka dari KPPN.....	25
C.7. Ekuitas.....	26

D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	26
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	26
D.2.	Beban Pegawai.....	27
D.3.	Beban Persediaan.....	27
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	28
D.5.	Beban Pemeliharaan.....	29
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	29
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	30
D.8.	Kegiatan Non Operasional.....	30
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	31
E.1.	Ekuitas Awal.....	31
E.2.	Surplus (defisit) LO.....	31
E.3.	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	31
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	31
E.4.1.	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	32
E.4.2.	Transfer Masuk.....	32
E.5.	Ekuitas Akhir.....	32
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	33
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	33
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	33
F.2.1.	Temuan dan Tindaklanjut Temuan BPK.....	33
F.2.2.	Informasi Pendaptan dan Belanja secara Akrua.....	33
F.2.3.	Rekening Pemerintah.....	33
F.2.4.	Revisi DIPA.....	34
F.2.5.	Ralat SPM, SSBP,SSPB.....	34
F.2.6.	Catatan Penting Lainnya.....	34
Lampiran-lampiran		

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Prov. BABEL, Pangkalpinang - BABEL Telp. 0717-9111513

e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Semester I 2026 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Semester I 2026 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 30 Juni 2026

Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. The stamp contains the text 'PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M.
NIP. 198112292006042015

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan instansi, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Semester I 2026 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Semester I 2026 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2026 s.d. 30 Juni 2026 .

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I 2026 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 2.670.500 ,- dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 6.534.000 ,-

Realisasi Belanja Negara pada Semester I 2026 adalah sebesar Rp 34.710.650,- atau mencapai 66% dari alokasi anggaran sebesar Rp 52.525.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2026. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan 213/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

233/PMK.05/2011, Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar **Rp. 26.945.891,-** yang merupakan aset lancar yang terdiri dari : Kas di Bendahara pengeluaran sebesar Rp. 1.000.000,- Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp. 6.288.920,- Persediaan sebesar Rp 19.656.971,-

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp 7.288.920,- yang terdiri dari Utang kepada pihak Ketiga sebesar Rp. 6.288.920,- Uang Muka dari KPPN Rp.1.000.000,-. Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 19.656.971,-. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar **Rp. 26.945.891,-**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 2.670.500 ,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 39.959.278,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.37.288.778,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus(DEFISIT) sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar(Rp.37.288.778,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2026 adalah sebesar Rp. 22.905.623 ,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp.37.288.778,-). kemudian ditambah dengan Selisih Revaluasi Aset Tetap senilai Rp. 0,- ditambah Koreksi Lain-Lain senilai Rp.0,- ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 34.040.126,- dan Kenaikan/Penurunan Ekuitas Rp. (3.248.652,-) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai Rp. 19.656.971,-

5. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

Berisi informasi keuangan tertentu yang tersaji sampai dengan 30 Juni 2026 . Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi pendukung atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2026.

I LRA

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
Semester I 2026 (dalam satuan Rupiah)

NO	Uraian	Catatan	TA 2026		
			Anggaran	Realisasi	%
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	A.1			
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	A.1.1	6.534.000	2.670.500	41
	Hibah	A.1.2	0	0	0
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		6.534.000	2.670.500	41
B.	Belanja Negara	B.2			
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	00
2.	Belanja Barang	B.2.2.	52.525.000	34.710.650	66
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	00
	Jumlah Belanja Negara		52.525.000	34.710.650	99.99

ilahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II NERACA

II. Neraca

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
NERACA SEMESTER I 2026
PER 30 Juni 2026
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN		Catatan		2026	2025
ASET					
Aset Lancar		C.1			
Kas dan Bank					
	Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.	1.	1.000.000	0
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.	2.	6.288.920	0
	Persediaan	C.1.	3.	19.656.971	22.905.623
Jumlah Aset Lancar				26.945.891	22.905.623
Aset Tetap		C.2			
	Tanah	C.2.	1.	0	0
	Peralatan dan Mesin	C.2.	2.	0	0
	Gedung dan Bangunan	C.2.	3.	0	0
	Aset Tetap Lainnya	C.2.	4.	0	0
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.	5.	0	(0)
Jumlah Aset Tetap				0	0
Aset Lainnya		C.4			
	Aset tak Berwujud	C.4.	1.	0	0
	Aset Lain-lain	C.4	2.	0	0
	Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset	C.4	3.	(0)	(0)
Jumlah Aset Lainnya				0	0
	Jumlah Aset			26.945.891	22.905.623
KEWAJIBAN					
Kewajiban Jangka Pendek		C.5			
	Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.	1.	6.288.920	0
	Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.	2.	0	
	Uang Muka dari KPPN	C.5	3.	1.000.000	0
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			0	0
	Jumlah Kewajiban			7.288.920	0
EKUITAS					
Ekuitas		C.6		19.656.971	22.905.623
	Jumlah Ekuitas			19.656.971	22.905.623
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas			26.945.891	7,573,123

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



III LAP. OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 Juni 2026
SEMESTER I 2026 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2026	2025
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	2.670.500	3.858.500
Jumlah Pendapatan		2.670.500	3.858.500
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	5.248.628	0
Beban Barang dan Jasa	D. 4	17.793.000	15.200.000
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	16.917.650	8.560.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 7	0	0
Jumlah Beban		39.959.278	23.760.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(37.288.778)	(19.901.500)
Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 11	0	0
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 12	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(37.288.778)	(19.901.500)
Pos Luar Biasa	D. 13	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(37.288.778)	(19.901.500)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini



IV LAP. PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TATA USAHA PANGKALPINANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 30 Juni 2026

SEMESTER I 2026 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2026	2025
Ekuitas Awal	E. 1	7,573,123	7,573,123
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(37.288.778)	(19.901.500)
Ekuitas	E. 3		
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.1	0	0
Selisih Revaluasi Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.3	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.4	0	0
Jumlah		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	34.040.126	12.491.500
Kenaikan/penurunan ekuitas		(3.248.652)	(7.410.000)
Ekuitas Akhir		19.656.971	163.123

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

V. Laporan Keuangan Tertentu dan Informasi Penting Lainnya

A. Laporan Keuangan Tertentu

1. Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran s.d. 30 Juni 2026

Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
A. Pagu	0	52.525.000	0	52.525.000
B. Realisasi s.d 30 Juni 2026	0	34.710.650	0	34.710.650
C. % Realisasi s.d 30 Juni 2026	0	66,08%	0	66,08%

Sampai dengan 30 Juni Semester I 2026, realisasi belanja pada satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebesar Rp. 34.710.650,- setara dengan 66,08%

2. Informasi Pagu Terdampak Direktif Presiden

NO	Jenis Belanja	Pagu awal	Pagu setelah direktif
1	Belanja barang operasional	180.000	58.000
2	Belanja barang non operasional	7.121.000	6.167.000

B. Informasi Penting Lainnya

1. Indikator Pelaksanaan Anggaran

**Indikator Pelaksanaan Anggaran
Per 30 Juni 2026**

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung
Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi
Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
Fungsi : Ketertiban dan Keamanan
Sub Fungsi : Peradilan
Program : Program Dukungan Manajemen
Lokasi : Kep. Bangka Belitung

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER																			
NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran						Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran			Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)
1	06 Juni	015	005	403429	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	98,38 10 9,84	99,46	100,00 25 25,00	100,00	89,84	90,00%	0,00

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sampai dengan 30 Juni 2026 pada satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang (403429) 89,84, konversi bobot 90% dan nilai akhir 99,82 .

2. Laporan Kinerja

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
SEMESTER I 2026

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung
Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi
Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
Fungsi : Ketertiban dan Keamanan
Sub Fungsi : Peradilan
Program : Program Dukungan Manajemen
Lokasi : Kep. Bangka Belitung

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan Kegiatan	%	
005.05.BF.1059.AEA.002	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara/ Koordinasi	1.587.000	1.587.000	100	1	1		100	
005.05.BF.1059.BCA.001	Perkara Hukum Perseorangan/ Perkara Peradilan TUN yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	222.000	0	0	1	0	Perkara	21	Belum dilakukukan penyesuaian target output
005.05.BF.1059.QB A.001	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara/ Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	33.216.000	15.906.000	47,89	96	69	Orang	60	
005.05.BF.1059.QCA.002	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara/ Perkara Hukum Perseorangan	17.500.000	17.217.650	98,39	1	1	Perkara	100	
	Sub Total	52.525.000	34.710.650						
	Penyesuaian	0							
	Total	52.525.000							

3. Hal Khusus Program Prioritas Nasional

Terdapat Rincian Output Prioritas Nasional Semester I 2026 yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yaitu RO Perkara sidang diluar gedung pengadilan di Lingkungan Tata Usaha Negara dan RO Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan rincian realisasi anggaran dna capaian output sampai dengan 30 Juni 2026 sebagai berikut :

No	Kode RO Strategis	Uraian RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian RO
1	1059.QCA.002	Perkara sidang diluar gedung pengadilan di Lingkungan Tata Usaha Negara	17.500.000	17.217.000	98,39%	1 Perkara	1 Perkara	100%
2	1059.QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	33.216.000	15.906.000	47,89	96	Orang	60%



VI Catatan Atas Laporan Keuangan

VI. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang didirikan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terletak di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan Aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu Rangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Modul Aset Tetap dan Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) Aplikasi SAKTI. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Modul Aset Tetap SAKTI adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I 2026 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi

apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan

naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementrian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan, Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2020. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal

nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Asset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Asset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Anggaran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. KM.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah mengadakan 3 (tiga) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal yaitu :

1. Revisi I tanggal 24 Desember 2025 berupa Revisi Efisiensi Anggaran Sehubungan dengan Direktif Presiden.
2. Revisi II tanggal 10 Februari 2026 berupa Revisi Hal. III DIPA Terkait Rencana Penarikan Dana Triwulan I (Januari-Maret) TA 2026 dan Pemutakhiran POK.
3. Revisi III tanggal 10 April 2026 tentang Revisi Hal. III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan II (April-Juni) dan Pemutakhiran POK.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

No.	Uraian	2026		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Angg.
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	790.000	270.000	34,18
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	1.200.000	690.000	57,5
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	4.544.000	1.710.000	37,64
4.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	
		6.534.000	2.670.500	40,87

B.1. Pendapatan

*Realisasi Pendapatan
Rp.2.670.500*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir dari pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 2.670.500 ,-. Pendapatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah dari Pendapatan Uang Meja (Leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNB

URAIAN	2026	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.534.000	6.534.000
Jumlah Pendapatan	6.534.000	6.534.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	53.601.000	52.525.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	53.601.000	52.525.000

B.2. Belanja

*Realisasi Belanja
Negara : Rp.
34.710.650*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 34.710.650 atau sebesar 66,08 % dari anggaran senilai Rp. 52.525.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni Semester I 2026 adalah sebagai berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026

Uraian	2026		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	52.525.000	34.710.650	66,08
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	52.525.000	34.710.650	66,08
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	52.525.000	34.710.650	66,08

Dibandingkan dengan realisasi 30 Juni 2025 senilai Rp 15.200.000 dari total Pagu Rp 53.385.000- atau senilai 28%, Realisasi Belanja per 30 Juni Semester I 2026 mengalami kenaikan penyerapan anggaran belanja barang yaitu sebesar 38% dimana pada semester I ini belanja perjalanan dinas sudah terserap.

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi Belanja
Pegawai : Rp. 0*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 30 Juni Semester I 2026 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi Belanja
Barang :
Rp.34.710.650*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Per 30 Juni Semester I 2026 dan TA 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 34.710.650 dan Rp.15.200.000. Ada penurunan anggaran jika dibandingkan dengan TA yang lalu. Namun untuk persentase penyerapan mengalami kenaikan sebesar 38%.

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 0 ,-

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni Semester I 2026 adalah sebesar Rp. 1.000.000,- kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni TA 2026

Uraian	TA 2026
Uang Tunai di Brankas	113.000
Uang di Bank	887.000
Kuitansi yang belum di SPM GUKan	0
Selisih Pembulatan	0
Jumlah	1.000.000

C.6. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di
Bendahara
Penerimaan :
Rp. 6.288.920

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 6.288.920,- Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni TA 2026

Uraian	TA 2026
Uang Tunai di Rekening RPL	6.288.920
Kuitansi yang belum di SPM GUKan	0
Selisih Pembulatan	0
Jumlah	0

C.7. Persediaan

Persediaan :
Rp. 19.656.971

Persediaan per 30 Juni Semester I 2026 adalah sebesar Rp. 16.656.971,- Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan

untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jumlah Sesuai dengan berita acara stock opname fisik.

C.8. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin : Rp. 0

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 adalah Rp. 0 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal	0
Mutasi Tambah	0
Reklasifikasi Masuk	0
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 30 Juni 2026	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	(0)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	0

C.9. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan
Aset tetap : Rp.
(0)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 Rp (0). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

C.10. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak
ketiga:

Rp. 6.288.920

Saldo utang kepada pihak ketiga per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 6.288.920.

C.11. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN:
Rp.1.000.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 1.000.000,- . Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.12. Ekuitas

Ekuitas:
Rp.19.656.971

Ekuitas per 30 Juni 2026 sebesar Rp. 19.656.971,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNBP :
Rp.2.670.500

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 Rp. 2.670.500 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2025

No.	Uraian	2026		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Angg.
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	790.000	270.000	34,18
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	1.200.000	690.000	57,5
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	4.544.000	1.710.000	37,64
4.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	
		6.534.000	2.670.500	40,87

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai :
Rp. 0

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 sebesar Rp.0 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni Semester I 2026

Uraian	TA 2026
Beban Gaji Pokok PNS	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0
Beban Tunj. Anak PNS	0
Beban Tunj. Struktural PNS	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	0
Beban Tunj. PPh PNS	0
Beban Tunj. Beras PNS	0
Beban Uang Makan PNS	0
Beban Tunjangan Umum PNS	0
Total Beban Pegawai	0

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan :
Rp. 5.248.628

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 sebesar Rp. 5.248.628,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2025

Uraian	TA 2026
Beban Persediaan Konsumsi	5.248.628
Total Beban Persediaan	5.248.628

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa :
Rp.17.793.000*

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni Semester I 2026 sebesar Rp. 17.793.000. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban bahan dan beban jasa konsultan.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2026

Uraian	TA 2026
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0
Beban Bahan	5.493.000
Beban Jasa Konsultan	12.000.000
Beban Jasa Lainnya	300.000
Total Beban Barang dan Jasa	17.793.000

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp. 0 Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2026 sebesar Rp. 0.

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2026

Uraian	TA 2026
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0
Total Beban Pemeliharaan	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas : Rp. 16.917.650

Beban Perjalanan Dinas untuk Semester I 2026 sebesar Rp. 16.917.650 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2026

Uraian	TA 2026
Beban Perjalanan Biasa	16.917.650
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	0
Total Beban Perjalanan Dinas	16.917.650

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni Semester I 2026 sebesar Rp 0 Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni Semester I 2026

Uraian	TA 2026
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
Beban Amortisasi Software	0
Beban Penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0

D.8. Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional : Rp. 0

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk Semester I 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2026

Uraian	TA 2026
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Beban Kegiatan Non Operasioanl Lainnya	0
Jumlah Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional	0
Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal :
Rp. 22.905.623*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 sebesar Rp 22.905.623,-

E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus(defisit) LO
: (Rp37.288.778)*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar (Rp.37.288.778). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset Tetap
Non Revaluasi: Rp. 0*

Koreksi Nilai Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah masing-masing sebesar Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan asset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas : Rp34.040.126,-*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.34.040.126,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	34.710.650
Diterima Dari Entitas Lain	(2.670.500)
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	1.999.976
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	34.040.126

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2026, DDEL sebesar Rp. (2.670.500) sedangkan DKEL sebesar Rp 34.710.650,-

E. 4.2 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan penerimaan dari entitas pelaporan lain. Pada periode hingga 30 Juni 2026, nilai transfer masuk sebesar Rp. 1.999.976,-.

E.5. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir :
Rp. 19.656.971,-*

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp. 19.656.971,-.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK baik di Tahun Anggaran 2025 maupun Tahun Anggaran sebelumnya.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Informasi pendapatan dan belanja secara akrual akan dijelaskan pada laporan keuangan Semester I 2026.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah :

1. BRI Cab. Pangkalpinang A/C 653244019681000 a.n. BPG 015 PTUN PKP yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2026 sebesar 4.275.000 merupakan saldo transportasi hakim bulan Mei 2026 yang belum dikirim
2. Bank BRI Cabang Pangkalpinang A/C 651554034291000 a.n. BPG 015 PTUN PKP 403429 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp.887.000.
3. Bank BRI Cabang Pangkalpinang A/C 0063-01-002185-30-7 a.n. RPL 015 PDT PTUN PKP UTK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp.6.288.920,-

F.2.4. Revisi DIPA

Pada periode Laporan Keuangan Semester I 2026 terdapat 3 (tiga) Revisi DIPA yaitu :

1. Revisi I tanggal 24 Desember 2025 berupa Revisi Efisiensi Anggaran Sehubungan dengan Direktif Presiden.
2. Revisi II tanggal 10 Februari 2026 berupa Revisi Hal. III DIPA Terkait Rencana Penarikan Dana Triwulan I (Januari-Maret) TA 2026 dan Pemutakhiran POK.
3. Revisi III tanggal 10 April 2026 tentang Revisi Hal. III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan II (April-Juni) dan Pemutakhiran POK.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pada periode Laporan Keuangan Semester I 2026 tidak terdapat ralat SPM, SSBP, maupun SSPB.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Prioritas nasional VII - Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pelaksanaannya diantaranya melalui 2 (dua) rincian output yaitu ;

1. Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN
2. Perkara sidang diluar gedung pengadilan di Lingkungan TUN

Lampiran-lampiran

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

: (005) MAHKAMAH AGUNG
: (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
: (3000) BANGKA BELITUNG
: (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 23/07/26 12:43 PM
Tgl Cetak : 23/07/26 2:20 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,670,500	3,858,500	(1,188,000)	(30.789)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,670,500	3,858,500	(1,188,000)	(30.789)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	2,670,500	3,858,500	(1,188,000)	(30.789)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	5,248,628	0	5,248,628	
Beban Barang dan Jasa	17,793,000	15,200,000	2,593,000	17.059
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	16,917,650	8,560,000	8,357,650	97.636
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: (005) MAHKAMAH AGUNG

ESELON I

: (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI

: (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA

: (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data

: 23/07/26 12:43 PM

Tgl Cetak

: 23/07/26 2:20 PM

Halaman

: 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	39,959,278	23,760,000	16,199,278	68.179
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(37,288,778)	(19,901,500)	(17,387,278)	87.367
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(37,288,778)	(19,901,500)	(17,387,278)	87.367
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(37,288,778)	(19,901,500)	(17,387,278)	87.367

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 23 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



DORA NATALIA SINGARIMBUN
NIP 198112292006042015

RINCIAN BEBAN PERJALANAN DALAM NEGERI TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2026

calk_lo_akun_satker_poc

Akun	Uraian	Jumlah
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	16,917,650
JUMLAH		16,917,650

RINCIAN BEBAN PERSEDIAAN TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2026

calk_lo_akun_satker_poc

Akun	Uraian	Jumlah
593111	Beban Persediaan konsumsi	5,248,628
JUMLAH		5,248,628

RINCIAN BEBAN BARANG NON OPERASIONAL TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2026

calk_lo_akun_satker_poc

Akun	Uraian	Jumlah
521211	Beban Bahan	5,493,000
522131	Beban Jasa Konsultan	12,000,000
522191	Beban Jasa Lainnya	300,000
JUMLAH		17,793,000

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
Tgl Data : 23/07/26 12:43 PM
Tgl Cetak : 23/07/26 2:21 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	1,000,000	0	1,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	6,288,920	0	6,288,920	0.00
Persediaan	19,656,971	22,905,623	(3,248,652)	(14.18)
JUMLAH ASET LANCAR	26,945,891	22,905,623	4,040,268	17.64
JUMLAH ASET	26,945,891	22,905,623	4,040,268	17.64
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	6,288,920	0	6,288,920	0.00
Uang Muka dari KPPN	1,000,000	0	1,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7,288,920	0	7,288,920	
JUMLAH KEWAJIBAN	7,288,920	0	7,288,920	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	19,656,971	22,905,623	(3,248,652)	(14.18)
JUMLAH EKUITAS	19,656,971	22,905,623	(3,248,652)	(14.18)
JUMLAH EKUITAS	19,656,971	22,905,623	(3,248,652)	(14.18)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	26,945,891	22,905,623	4,040,268	17.64

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 23 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DORA NATALIA SINGARIMBUN
NIP 198112292006042015

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
Tgl Data : 23/07/26 12:43 PM
Tgl Cetak : 23/07/26 2:21 PM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,000,000	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	6,288,920	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	19,656,971	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	6,288,920
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	1,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	34,710,650
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,670,500	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	1,999,976
0.0	391111	Ekuitas	0	22,905,623
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	270,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	690,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	1,710,500
3.0	521211	Beban Bahan	5,493,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	12,000,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	300,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	16,917,650	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	5,248,628	0
JUMLAH			69,575,669	69,575,669

Keterangan :
FINAL
Pangkalpinang, 23 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DORA NATALIA SINGARIMBUN
NIP 198112292006042015

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 23/07/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 23/07/26 2:21 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	34,710,650
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	2,670,500	0
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	270,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	690,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	1,710,500
3.0	521211	Belanja Bahan	5,493,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	12,000,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	300,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,917,650	0
JUMLAH			37,381,150	37,381,150

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 23 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DORA NATALIA SINGARIMBUN
198112292006042015

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 05
SATUAN KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG 403429

Tgl Data : 23/07/26 12:43 PM
Tgl Cetak : 23/07/26 2:20 PM
Halaman : 1
lap_ira_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah								
I. Pendapatan Perpajakan								
1. Pajak Dalam Negeri								
2. Pajak Perdagangan Internasional								
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	6,534,000	2,670,500	(3,863,500)	41	5,251,000	3,858,500	1,392,500	73
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	6,534,000	2,670,500	(3,863,500)	41	5,251,000	3,858,500	1,392,500	73
III. Pendapatan Hibah	0							
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	6,534,000	2,670,500	(3,863,500)	41	5,251,000	3,858,500	1,392,500	73
B. Belanja Negara								
I. Belanja Pemerintah Pusat								
1. Belanja Pegawai	52,525,000	34,710,650	(17,814,350)	66	53,385,000	15,200,000	38,185,000	28
2. Belanja Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belanja Modal	52,525,000	34,710,650	(17,814,350)	66	53,385,000	15,200,000	38,185,000	28
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005

ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 05

SATUAN KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG 403429

Tgl Data : 23/07/26 12:43 PM

Tgl Cetak : 23/07/26 2:20 PM

Halaman : 2

lap_jra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	52,525,000	34,710,650	(17,814,350)	66	53,385,000	15,200,000	38,185,000	28
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Pangkalpinang, 23 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



DORA NATALIA SINGARIMBUN

NIP 198112292006042015

RINCIAN PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN HUKUM TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2026

calk_lo_akun_satker_poc

Akun	Uraian	Jumlah
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan	-270,000
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	-690,000
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	-1,710,500
JUMLAH		-2,670,500

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

: 005
: 05
: 3000
: 403429

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 30/07/26 4:45 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	790,000	270,000	0	270,000	34.18
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1,200,000	690,000	0	690,000	57.5
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	4,544,000	1,710,500	0	1,710,500	37.64
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya					
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	6,534,000	2,670,500	0	2,670,500	40.87
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	6,534,000	2,670,500	0	2,670,500	40.87
	JUMLAH PENDAPATAN	6,534,000	2,670,500	0	2,670,500	40.87

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 403429
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/07/26 4:45 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_saker_poc
Tgl Data : 30/7/26 4:00 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	180,000	58,000	0	0	0	0	58,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	180,000	58,000	0	0	0	0	58,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	7,121,000	6,167,000	5,493,000	0	5,493,000	89.07	674,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	7,121,000	6,167,000	5,493,000	0	5,493,000	89.07	674,000
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	28,800,000	28,800,000	12,000,000	0	12,000,000	41.67	16,800,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	300,000	300,000	300,000	0	300,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	29,100,000	29,100,000	12,300,000	0	12,300,000	42.27	16,800,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,200,000	17,200,000	16,917,650	0	16,917,650	98.36	282,350
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	17,200,000	17,200,000	16,917,650	0	16,917,650	98.36	282,350
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	53,601,000	52,525,000	34,710,650	0	34,710,650	66.08	17,814,350
	JUMLAH BELANJA	53,601,000	52,525,000	34,710,650	0	34,710,650	66.08	17,814,350

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
Tgl Data : 23/07/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 23/07/26 2:20 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	22,905,623	7,573,123	15,332,500	202.46
SURPLUS/DEFISIT-LO	(37,288,778)	(19,901,500)	(17,387,278)	87.37
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	34,040,126	12,491,500	21,548,626	172.51
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(3,248,652)	(7,410,000)	4,161,348	(56.16)
EKUITAS AKHIR	19,656,971	163,123	19,493,848	11,950.4

Keterangan :
FINAL
Pangkalpinang, 23 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran


DORA NATALIA SINGARIMBUN
NIP 198112292006042015

RINCIAN SURPLUS/DEFISIT-LO TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2026

calc_lpe_akun_satker_poc

Akun	Uraian	2026	2025
391112	Surplus/Defisit-LO	0	0
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	270,000	360,000
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	270,000	360,000
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	690,000	1,100,000
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	690,000	1,100,000
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1,710,500	2,398,500
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1,710,500	2,398,500
522131	Beban Jasa Konsultan	-12,000,000	-12,000,000
522131	Pengembalian Beban Jasa Konsultan	-12,000,000	-12,000,000
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	-16,917,650	-8,560,000
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	-16,917,650	-8,560,000
522191	Beban Jasa Lainnya	-300,000	-300,000
522191	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	-300,000	-300,000
521211	Beban Bahan	-5,493,000	-2,900,000
521211	Pengembalian Beban Bahan	-5,493,000	-2,900,000
593111	Beban Persediaan konsumsi	-5,248,628	0
593111	Pengembalian Beban Persediaan konsumsi	-5,248,628	0
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0
593113	Pengembalian Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	0
521114	Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	0
JUMLAH		-74,577,556	-39,803,000

RINCIAN KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2026

calc_lpe_akun_satker_poc

Akun	Uraian	2026	2025
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	34,710,650	15,200,000
313121	Diterima dari Entitas Lain	-2,670,500	-3,858,500
313221	Transfer Masuk	1,999,976	1,150,000
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	270,000	360,000
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	270,000	360,000
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	690,000	1,100,000
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	690,000	1,100,000
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1,710,500	2,398,500
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1,710,500	2,398,500
522131	Beban Jasa Konsultan	-12,000,000	-12,000,000
522131	Pengembalian Beban Jasa Konsultan	-12,000,000	-12,000,000
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	-16,917,650	-8,560,000
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	-16,917,650	-8,560,000
522191	Beban Jasa Lainnya	-300,000	-300,000
522191	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	-300,000	-300,000
521211	Beban Bahan	-5,493,000	-2,900,000
521211	Pengembalian Beban Bahan	-5,493,000	-2,900,000
593111	Beban Persediaan konsumsi	-5,248,628	0
593111	Pengembalian Beban Persediaan konsumsi	-5,248,628	0
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0
593113	Pengembalian Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	0
521114	Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	0
null	null	0	0
JUMLAH		-40,537,430	-27,311,500

RINCIAN TRANSAKSI ANTAR ENTITAS TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2026

calc_lpe_akun_satker_poc

Akun	Uraian	2026	2025
313111	Ditagikan ke Entitas Lain	34,710,650	15,200,000
313121	Diterima dari Entitas Lain	-2,670,500	-3,858,500
313221	Transfer Masuk	1,999,976	1,150,000
JUMLAH		34,040,126	12,491,500



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG *SEMESTER 1 TAHUN 2026*

BAGIAN ANGGARAN 005.05
403429

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9111513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga mencakup aset-aset yang dimiliki negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah Psemua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. BMN merupakan bagian penting dari kekayaan negara yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pertanggungjawaban atas keuangan negara. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan BMN merupakan salah satu unsur penting dalam keuangan negara, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan secara terintegrasi dan transparan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN serta pengelolaan BMN, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai salah satu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di bawah Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), yaitu Badan Urusan Administrasi untuk DIPA 01 melalui Biro Perlengkapan. LBKP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan Barang Milik Negara untuk periode tahunan.

Proses penyusunan LBKP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan PMK



Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara.

Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan komitmennya menyajikan informasi yang relevan dan andal dalam mendukung penyusunan laporan ini.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan LBKP Tahunan Pengadilan ... Tahun 2026 (*Audited*), kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperoleh gambaran menyeluruh terkait pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengambil keputusan di jajaran manajemen Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait dengan pengelolaan BMN.

Jakarta, 30 Juli 2026

**Sekretaris Sekretaris Pengadilan Tata
Usaha Negara Pangkalpinang Sekretaris
selaku Kuasa Pengguna Barang**



Dora Natalia Singarimbun, SE., M.M
NIP. 19811229 200604 2 015



DAFTAR ISI

DATA UTAMA

- 1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA**
- 2. Laporan Posisi BMN di Neraca 30 Juni 2026**
- 3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)**
- 4. Laporan Barang Persediaan**
- 5. Laporan Barang Intrakomptabel**
- 6. Laporan Barang Ekstrakomptabel**
- 7. Laporan Barang Gabungan**
- 8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan**
- 9. Laporan Aset Tak Berwujud**
- 10. Laporan Barang Bersejarah**
- 11. Laporan Barang Rusak Berat**
- 12. Laporan Barang Hilang**
- 13. Laporan Barang BPYBDS**
- 14. Laporan Barang Hibah DK/TP**
- 15. Laporan Penyusutan Intrakomptabel**
- 16. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel**
- 17. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud**
- 18. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)**
- 19. Laporan PNBPN (yang bersumber dari Pengelolaan BMN)**
- 20. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara**
- 21. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara**
- 22. Laporan BMN Berupa Rumah Negara**

DATA TAMBAHAN

- 1. Neraca Percobaan Berbasis AkruaL dan Laporan Neraca Tingkat Satuan Kerja (2 Dokumen Cetak)**
- 2. Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan Penjelasan Selisihnya**
- 3. Data/Laporan Aset Sengketa (Jika Tidak Ada Dibuat NIHIL)**
- 4. Rekapitulasi dan Rincian Transaksi Hibah Masuk dan Hibah Keluar BMN Berupa Aset Tetap dan Persediaan**
- 5. Gambaran Umum Terkait Pengelolaan BMN**



DAFTAR LAMPIRAN

1. **Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode Persediaan (jika ada)**
2. **Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode BMN (jika ada)**
3. **Penjelasan BMN: Jalan dan Jembatan (jika ada)**
4. **Penjelasan BMN: Irigasi (jika ada)**
5. **Penjelasan BMN: Jaringan (jika ada)**
6. **Penjelasan BMN: Aset Tetap Renovasi (jika ada)**
7. **Penjelasan BMN: Aset Tak Berwujud Lainnya (jika ada)**
8. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Persediaan (jika ada)**
9. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (jika ada)**
10. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Non Revaluasi (jika ada)**
11. **Penjelasan BMN: Koreksi atas Reklas Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (jika ada)**
12. **Penjelasan BMN: Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)**
13. **Penjelasan BMN: Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)**
14. **Penjelasan BMN: Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin (jika ada)**
15. **Penjelasan BMN: Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan (jika ada)**
16. **Penjelasan BMN: Beban Pelepasan Aset (jika ada)**
17. **Penjelasan BMN: Beban Persediaan Rusak/Usang (jika ada)**



OVERVIEW LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA (NAMA SATUAN KERJA) TAHUN 2026 (AUDITED)

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 *Audited* merupakan laporan tahunan yang disusun oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selaku Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN di awal dan akhir periode Tahun Anggaran 2025 serta mutasi selama periode tersebut. LBP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selama Tahun Anggaran 2025.

Tujuan utama penyusunan LBKP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 (*Audited*) ini adalah untuk memberikan gambaran awal dan komprehensif mengenai posisi awal dan akhir BMN yang dikuasai dan dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang beserta mutasi tambah kurangnya. Informasi yang terkandung dalam LBP *Audited* ini menjadi dasar bagi penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan (LK) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 (*Audited*).

Penyusunan LBKP (*Audited*) ini telah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang rekonsiliasi dan pelaporan BMN serta mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Selain itu, LBP (*Audited*) ini juga telah memperhatikan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2026, dan Nomor S-3/KN/KN.2/2025 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada Kementerian/Lembaga Tahun 2026. Dalam penyusunannya, LBP (*Audited*) ini telah menerapkan penggunaan SAKTI (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi) dan MonSAKTI (Monitoring SAKTI) milik Kementerian Keuangan serta Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk memastikan konsistensi dan integritas data yang disajikan dalam laporan.

Laporan ini memuat berbagai informasi penting terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN, yang terdiri dari:

1. LBMN Berdasarkan Perkiraan Neraca: Bagian ini menyajikan informasi aset



BMN secara rinci, meliputi Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Lainnya (termasuk Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah). Selain itu, laporan ini juga merinci Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Aset Tetap Lainnya, Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (khususnya untuk aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah);

2. Nilai Neraca per 30 Juni 2026 adalah Rp... yang berasal dari nilai saldo awal 1 Januari 2026 sebesar Rp... dan mutasi tambah kurang sebesar Rp...
3. Mutasi tambah aset terjadi karena: (1) realisasi belanja modal, terdiri atas pembelian; (2) Transfer Masuk BMN; (3) Koreksi Nilai Bertambah dan lain sebagainya. Total mutasi tambah aset adalah sebesar Rp 25.542.083.089,00;
4. Mutasi kurang aset terjadi karena: (1) penghapusan BMN melalui penjualan; (2) Koreksi Nilai Berkurang dan lain sebagainya. Total mutasi kurang aset adalah sebesar Rp 24.969.879.593,00;
5. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara: bagian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna barang mengenai hal-hal yang termuat dalam Laporan Barang Pengguna. Catatan ini mencakup uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos Laporan Barang Pengguna, serta daftar rinci atau uraian mengenai mutasi aset yang disajikan dalam Neraca dan informasi penting lainnya; dan
6. Gambaran Umum Pengelolaan BMN: bagian ini memuat data Penetapan Status Penggunaan BMN (sudah ditetapkan status penggunaan dan belum ditetapkan status penggunaan); pengelolaan BMN (Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan): 1) dalam proses permohonan ke Pengelola; 2) dalam proses Pengelola Barang; 3) selesai di Pengelola Barang baik dikembalikan, ditolak dan disetujui; 4) dalam proses tindak lanjut Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang; 5) telah diterbitkan Keputusan dari Pengelola Barang; 6) tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang; dan 7) selesai serah terima.

LBKP (*Audited*) ini merupakan landasan penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Tahun 2026 (*Audited*). Penyusunan LBKP (*Audited*) yang berkualitas menjadi langkah awal yang esensial dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa penyusunan LBKP (*Audited*) ini tidak



hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan menyusun LBKP (*Audited*) secara tepat waktu dan akurat, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah berkomitmen dalam mengelola BMN secara bertanggung jawab dan transparan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.



18. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

BAGIAN ANGGARAN DKS-05
483429

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Mahkamah Agung, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.



A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan



Keuangan Pemerintah;

- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2026 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 29) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;



- 30) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 31) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 32) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 33) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 34) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
- 35) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan.

B. Entitas Pelaporan

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selaku salah satu satuan kerja/unit Eselon I di bawah Mahkamah Agung merupakan entitas pelaporan Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Pengguna Barang Eselon I.

C. Periode Pelaporan

Periode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CaLBMN) ini adalah untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa Pengguna Barang/ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor



181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN
6. Pelaporan BMN

A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodefikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.



Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Tahun 2026, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadap kodefikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodefikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodefikasi BMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodefikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan.

B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.



Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan..

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.

C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Kapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)**, BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dalam LBKP Tahun 2026 (*Audited*) ini telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.**

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.
3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.
4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri



Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/MK/KN/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.**

Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

F. Kebijakan Pelaporan BMN

Seluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitas pengelolaan BMN akan tercermin dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMN adalah Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2026 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Kepala Biro



Perlengkapan Nomor ... Di dalamnya ketentuan penyusunan LBKP juga pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan melalui **Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Tingkat K/L Tahun 2026 dan Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-3/KN/KN.2/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada K/L Tahun 2026 (Audited).**

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) ini adalah sebesar Rp 34,315,013,142,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tiga Belas Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp33,742,809,646,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2026 sebesar Rp. 572,203,496,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam rupiah*). Nilai mutasi tersebut berasal dari mutasi tambah sebesar Rp 25,542,083,089,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp 24,969,879,593,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) yang terjadi selama Tahun Anggaran 2025.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.



Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 30 Juni 2026
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2026
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
7. Laporan Aset Tak Berwujud;
8. Laporan Barang Bersejarah;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan BPYBDS;
12. Laporan Barang Hibah DK/TP
13. Laporan Penyusutan;
14. Laporan Amortisasi BMN;
15. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN);
16. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN);
17. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN;
18. Rekapitulasi KDP Beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
19. Laporan BMN berupa Rumah Negara.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Saldo Awal

Nilai BMN per 1 Januari 2026 menurut Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebesar Rp. 22.905.623,00 (Lima Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) yang terdiri dari nilai persediaan sebesar Rp. 22.905.623,00 (Lima Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).



B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (Audited)

Tidak terdapat Mutasi BMN per Semester I Tahun 2026.

1. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester I Tahun 2026 sebesar Rp.22.905.623,00 (Delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga Rupiah), tidak terdapat perubahan nilai persedian dikarenakan pembelian persedian langsung ditransfer ke Posbankum PTUN Pangkalpinang dan saldo persedian berasal dari barang persediaan TKTM yang belum disalurkan dikarenakan kebutuhan akan alat kelengkapan persidangan sudah terpenuhi.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
Barang Konsumsi	22.905.623	(3.248.652)	19.656.971
Amunisi	0	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	00	0	0
Suku Cadang	0	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0	0
Bahan Baku		0	0
Barang dalam Proses	0	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0	0
Persediaan lainnya	0	0	0
Jumlah	22.905.623	(3.248.652)	19.656.971

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp 0,00 yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp 0,00 dan kondisi usang senilai Rp 0,00 .



2. Tanah

Tidak terdapat nilai pada Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester I Tahun 2026.

3. Peralatan dan Mesin

Tidak terdapat nilai pada Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester I Tahun 2026.

4. Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat nilai pada Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester I Tahun 2026.

5. Aset Tetap Lainnya

Tidak terdapat nilai pada Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester I Tahun 2026.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tidak terdapat nilai pada Konstruksi dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester I Tahun 2026.

7. Aset Lainnya

Tidak terdapat nilai pada aset lainnya dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester I Tahun 2026.

**V. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 30 Juni 2026****A. BMN per Akun Neraca**

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester I Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 22.905.623,00 (Delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga sRupiah). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya, Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan, dan Akumulasi Penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan. Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
117111	Persediaan	22.905.623
131111	Tanah	0
132111	Peralatan dan Mesin	0
133111	Gedung dan Bangunan	0
135121	Aset Tetap Lainnya	0
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
166112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	0
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	0
JUMLAH		22.905.623

Tabel 26. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca



B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 (*Audited*) per 30 Juni 2026 per akun neraca adalah sebagai berikut:

NAMA ASET	UAKPA	UAKPB
Persediaan	22.905.623	22.905.623
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	0	0



Akumulasi Penyusutan Software	0	0
Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0	0
Total	22.905.623	22.905.623

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Tabel 27. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.



VI. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir (*Audited*), dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Laporan Unaudited 2021	2.566.575	-	-
2	Laporan Unaudited 2022	4.039.715	1.473.140	57%
3	Laporan Unaudited 2023	1.448.500	-	-
4	Laporan Unaudited 2024	7.573.123	2.591.215	-64%
5	Laporan Unaudited 2025	22.905.623	6.124.623	423%
			15.332.500	202%

Tabel 27. Perkembangan Nilai BMN Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Periode Laporan *Audited*

B. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

b. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selama periode Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

c. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

1. BMN dalam sengketa/perkara/bermasalah

-

2. Tanah Belum Bersertipikat

-

d. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

-

e. Pengungkapan Penting Lainnya

-

f. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan

-



g. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN di Lingkungan Mahkamah Agung

Dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu disusun pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN karena PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara belum merinci secara spesifik SBSK kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya



C. Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.a/LHP/XIV/05/2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 618/BUA.4/PL1.2/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Petunjuk Teknis Tinjau Temuan BPK atas LKKL Tahun 2024 terkait Aset Tetap dan Persediaan, **Tidak Terdapat** temuan BPK pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terkait ... **(Aset Tetap/Persediaan/dll)** dengan rincian temuan dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Temuan BPK atas LKKL

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut/Keterangan
1	-	-

Tabel 34. Daftar Temuan BPK atas LKKL 2024 dan Tindak Lanjutnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

2. Temuan BPK atas LKPP

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut/Keterangan
1	-	-

Tabel 34. Daftar Temuan BPK atas LKPP 2024 dan Tindak Lanjutnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang



GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya masih mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Beberapa kebijakan terkait pengelolaan BMN secara internal juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, antara lain: Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 275/SEK/PL1.2/VII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan Mahkamah Agung juga telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Banding, dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Pertama untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan atas Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut di atas. Berikut ini adalah gambaran pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selama tahun 2026.

a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

Pada Tahun 2026 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang juga akan mengajukan usulan RP3BMN untuk Tahun 2028 dengan rincian sebagai berikut:

- “Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak mengajukan usulan RP33BMN untuk tahun 2028.”

Revisi RKBMN

- “Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak mengajukan Revisi RKBMN untuk tahun 2028.”



b. Penetapan Status Penggunaan BMN

- “Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak memiliki permohonan penetapan status penggunaan BMN”

c. Pengelolaan BMN

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melakukan permohonan terkait (Penjualan dan Penetapan Status Penggunaan (PSP) ke Pengelola Barang (melalui KPKNL setempat) sampai dengan 30 Juni 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam Proses Permohonan ke Pengelola

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 30 Juni 2026 masih terdapat permohonan terkait pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang untuk menerbitkan persetujuan/keputusan (Penjualan dan Penetapan Status Penggunaan (PSP) dengan nilai sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

- “Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang masih dalam proses permohonan ke pengelola”

2. Dalam Proses Tindak Lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 30 Juni 2026 masih terdapat permohonan terkait pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk permohonan pengelolaan BMN dengan rincian sebagai berikut:

- “Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.”

3. Telah Diterbitkan Keputusan Dari Pengelola Barang

- “Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan keputusan dari pengelola barang “

4. Selesai Serah Terima

- “Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang telah selesai serah terima “



DATA UTAMA

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

BAGIAN ANGGARAN 005.05
403429

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkajene Baru,
Pangkajene, Prov. Kep. Bangka Belitung





1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

BAGIAN ANGGARAN 005.05
483429

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprop Telp / Fax. (0717) 9111513
Pangkalpinang - Bangka 33148
Email : info@ptun-pangkalpinang.go.id Website : www.ptun-pangkalpinang.go.id

**BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
SATUAN KERJA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG (403429)
SEMESTER I TAHUN 2026
NOMOR : 199/SEK.PTUN.W5-TUN5/PL1.2.5/VII/2026**

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (30/06/2026), bertempat di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Komplek Perkantoran Pemprov Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Muhammad Agus, S.E., M.Si.**
NIP : **19850207 200604 1 001**
Jabatan : Petugas UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : **Fanny Ruspanji, S.E.I.**
NIP : **19900412 202012 1 009**
Jabatan : Petugas UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (KP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode 30 Juni Tahun Anggaran 2026, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Semester I Tahun Anggaran 2026		
		Saldo Awal per 01 Januari 2026	Mutasi	Saldo Akhir per 30 Juni 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
A	ASET LANCAR	22.905.623	(3.248.652)	19.656.971
1	Persediaan	22.905.623	(3.248.652)	19.656.971
B.	ASET TETAP	0	0	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0
8	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
9	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	22.905.623	-3.248.652	19.656.971
E	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0
F	TOTAL (D+E)	22.905.623	-3.248.652	19.656.971

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKK/L disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode 30 Juni Tahun Anggaran 2026, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator Aset


Ovit Samuel Purba, S.T.
NIP. 19911282025061004

Operator GLP


Fanny Ruspanji, S.E.I.
NIP. 199004122020121009

Mengetahui
Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang


Dora Natalia Singarimbun, SE., M.M.
NIP. 19811229 200604 2 015

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
keuangan	barang

II. PERIODE	
0 6 / 2 6	

UNIT ORGANISASI	
1. Kode	0 0 5 - 0 5 - 3 0 0 0 - 4 0 3 4 2 9 - 0 0 0 - K D
2. Nama	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Jl. Pulau Bangka, Komplek Pemprov Bangka Belitung.

III. SALDO AKHIR PERIODE YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN				
NO	PERKIRAAN NERACA	GLP	ASET TETAP	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	19.656.971	19.656.971	19.656.971
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
2	Persediaan	19.656.971	19.656.971	19.656.971
B	ASET TETAP	0	0	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Aset tetap lainnya	0	0	0
5	Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0
8	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
9	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	19.656.971	19.656.971	19.656.971
E	EKSTRAKOMPABEL	0	0	0
F	TOTAL (D + E)	19.656.971	19.656.971	19.656.971

IV. DATA KOREKSI AUDIT SALDO NILAI BMN					
NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
(1)	(2)	(3)	TAMBAH	KURANG	(6) = (3) + (4) - (5)
A	ASET LANCAR	19.656.971	0	0	19.656.971
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0
2	Persediaan	19.656.971	0	0	19.656.971
B	ASET TETAP	0	0	0	0
1	Tanah	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
4	Aset tetap lainnya	190.000	0	0	190.000
5	Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0	0
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
8	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0
9	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	19.656.971	0	0	19.656.971
E	EKSTRAKOMPABEL	0	0	0	0
F	TOTAL (D + E)	19.656.971	0	0	19.656.971

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
keuangan	barang

II. PERIODE	
0 6 / 2 6	

UNIT ORGANISASI																							
1. Kode	0	0	5	-	0	1	-	3	0	0	4	0	3	4	2	9	-	0	0	0	-	K	D
2. Nama	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Jl. Pulau Bangka, Komplek Pemprov Bangka Belitung.																						

V. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN						
NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL			TOTAL
			Belanja Barang	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	ASET LANCAR					
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0	0
2	Persediaan	0	0	0	0	0
B	ASET TETAP					
1	Tanah	0	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0
5	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	0	0	0	0	0
6	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	0	0	0	0	0
7	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0	0
8	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0	0
C	ASET LAINNYA					
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	0	0	0	0	0
E	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0	0	0
F	TOTAL (D+E)	0	0	0	0	0

VI. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Bulan Juni Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp.0.-

VII. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada Pengungkapan lain-lain yang perlu dijelaskan dalam Rekonsiliasi Data BMN ini.

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

II. PERIODE			
0	6	2	6

UNIT ORGANISASI	
1. Kode	0 0 5 0 1 3 0 0 0 4 0 3 4 2 9 0 0 0 K D
2. Nama	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Jl. Pulau Bangka, Komplek Pemprov Bangka Belitung.

No.	No. SP2D	Tgl. SP2D	Jns. Belanja	Uraian Jns. Belanja	Rupiah SPM	Tot. Rupiah SPPA	Selisih
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
27							

No.	No. SP2D	Tgl. SP2D	Jns. Belanja	Uraian Jns. Belanja	Rupiah SPM	Tot. Rupiah SPPA	Selisih
							0

NIHIL

No.	No. SP2D	Tgl. SP2D	Jns. Belanja	Uraian Jns. Belanja	Rupiah SPM	Keterangan
-----	----------	-----------	--------------	---------------------	------------	------------

NIHIL



INSTRUMEN

2. Laporan Posisi BMN di Neraca 30 Juni 2026

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

BAGIAN ANGGARAN 005.05
483425

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2026
TAHUN ANGGARAN 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl.Data : 31/07/26 6:38 AM
Tgl.Cetak : 31/07/26 8:30 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	19,656,971
J U M L A H		19,656,971



3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

BAGIAN ANGGARAN 005.05
403420

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2026(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tanggal : 31/07/26 8:31 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	22,905,623
J U M L A H		22,905,623



PANGKALPINANG

4. Laporan Barang Persediaan

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

BAGIAN ANGGARAN 005.05
183429

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 31/07/26 6:38 AM
Tanggal : 31/07/26 9:07 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301005	Buku Tulis	
1010307001	Bahan Baku Pakaian	400,000
1010307006	Atribut	10,153,971
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3,200,000
Jumlah Barang Konsumsi		5,903,000
TOTAL		19,656,971
		19,656,971

Keterangan :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Persediaan senilai Rp. | 0 dalam kondisi rusak. |
| 2. Persediaan senilai Rp. | 0 dalam kondisi usang. |



5. Laporan Barang Intrakomptabel

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

RAGIAN ANGGARAN 005.05
483429

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005
UAKPB : 403429

Tgl Data : 31/07/26 6:38 AM
Tgl Cetak : 31/07/26 9:09 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_salker_poc

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

AKUN NERACA KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2026			MUTASI			SALDO PER 30 JUNI 2026		
			BERTAMBAH			BERKURANG					
			KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	



10.10.2026

6. Laporan Barang Ekstrakomptabel

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

BAGIAN ANGGARAN 005.05
483429

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



011-2500000



011-2500000



011-2500000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005

UAKPB : 403429

MAHKAMAH AGUNG

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 31/07/26 6:38 AM

Tgl Cetak : 31/07/26 9:09 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2026				MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
				BERTAMBAH				BERKURANG					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			



PANGKALPINANG

7. Laporan Barang Gabungan

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

BAGIAN ANGGARAN 005.05
483425

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005
UAKPB : 403429

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 31/07/26 6:38 AM
Tgl Cetak : 31/07/26 9:09 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_saker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
			BERTAMBAH		BERKURANG					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

BAGIAN ANGGARAN 005-05
493429

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
Rincian per sub sub kelompok barang
untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026

Tgl Data : 31/07/26 6:38 AM
Tanggal : 31/07/26 9:10 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_saker_poc

UAPB : 005
UAKPB : 403429

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S D 1 JANUARI 2026	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 30 JUNI 2026	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	



BERASALOK

9. Laporan Aset Tak Berwujud

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

BAGIAN ANGGARAN 005.05
483429

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkajene Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



011-7150000



www.pengadilan.go.id

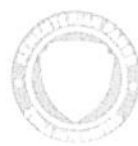
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 31/07/26 6:38 AM
Tanggal : 31/07/26 9:10 AM
Halaman : 1

Kode Lap : lap_alb_salker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
			BERTAMBAH		BERKURANG					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



10. Laporan Barang Bersejarah

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

BAGIAN ANGGARAN 005.05
403429

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 31/07/26 6:38 AM
Tanggal : 31/07/26 9:12 AM
Halaman : 1

		AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2026	MUTASI			SALDO PER 30 JUNI 2026
KODE					BERTAMBAH		BERKURANG	
1					KUANTITAS		KUANTITAS	
	2		3	4	5		6	7
				KUANTITAS			KUANTITAS	

Kode Lap : lap_bmn_sejarah_saker_poc





REPUBLIK INDONESIA

12. Laporan Barang Hilang

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

BAGIAN ANGGARAN 005.05
403429

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung





13. Laporan Barang BPYBDS

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

BAGIAN ANGGARAN 005.05
483429

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkajene, Prov. Kep. Bangka Belitung



UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

NAMA UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

KODE UAKPB : 403429

TANGGAL: 31-07-2026

Kode LAP : daftar_bmn_bpybds_p

HALAMAN: 1dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							



PANGKAL PINANG

14. Laporan Barang Hibah DK/TP

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

BAGIAN ANGGARAN 005.05
483425

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



011-2122111



www.pengadilanpn.go.id



laporan_barang_kuasa_pengguna@pengadilanpn.go.id

**DAFTAR BMN HIBAH DK/TP YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

NAMA UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
KODE UAKPB : 403429

TANGGAL: 31-07-2026

Kode LAP : daftar_bmn_dhdktp_poc

HALAMAN: 1 dari 1

NO		KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
					MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data								
JUMLAH								



KEJARI PANGKAL PINANG

15. Laporan Penyusutan Intrakomptabel

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

BAGIAN ANGGARAN 005.05
483429

Jalan Pulau Bangka, Padang Bara Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



011-2122111



www.kemdikbud.go.id



info@kemdikbud.go.id

UAPB : 005
UAKPB : 403429

MAHKAMAH AGUNG

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Cetak : 31/07/26 9:16 AM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG										SALDO 30 JUNI 2026									
KODE		URAIAN		SAT		Kuantitas		NILAI		AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU					
1		2		3		4		5		SALDO AWAL		MUTASI PENYUSUTAN		TOTAL					
										6		7		8=6+7					
										9=5-8									



PANGKAL PINANG

16. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

BAGIAN ANGGARAN 005.05
483429

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkajene, Pangkajene Arungmuti, Kabupaten Pangkajene Arungmuti,
Prov. Kepulauan Bangka Belitung



0812-3456789



laporan@pn-pangkalpinang.go.id



www.pn-pangkalpinang.go.id

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 31/07/26 6:38 AM
Tgl Cetak : 31/07/26 9:16 AM
Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_salker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT				SALDO 30 JUNI 2026			
KODE	URAIAN	Kuantitas		Nilai		SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8	



UNPANGKAL

17. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

TAGIAN ANGGARAN 805.05
483425

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



011-2991000



www.unpangkalpinang.go.id



facebook.com/unpangkalpinang

UAPA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

UAPA : 005
UAKPB : 403429

Tgl Data : 31/07/26 6:38 AM
Tanggal : 31/07/26 9:16 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_salker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2026							
KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS		NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
			4	5					
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8	



BERAKHLAK

19. Laporan PNBPN (yang bersumber dari Pengelolaan BMN)

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

BAGIAN ANGGARAN D05.05
483429

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0812-331433



www.pangkalpinang.go.id



laporan_barang_kuasa_pengguna@ptun-pangkalpinang.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

: 005
: 05
: 3000
: 403429

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 31/07/26 9:26 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_salker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	790.000	270.000	0	270.000	34.18
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1.200.000	690.000	0	690.000	57.5
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	4.544.000	1.710.500	0	1.710.500	37.64
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya					
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	6.534.000	2.670.500	0	2.670.500	40.87
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	6.534.000	2.670.500	0	2.670.500	40.87
	JUMLAH PENDAPATAN	6.534.000	2.670.500	0	2.670.500	40.87



20. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

BAGIAN ANGGARAN 005.05
403425

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



PANGKALPINANG

21. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

BAGIAN ANGGARAN D05.05
403429

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung





PANGKAL PINANG

22. Laporan BMN Berupa Rumah Negara

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

BAGIAN ANGGARAN 005.05
403429

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Rep. Bangka Belitung



011



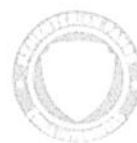
011

011



011

011



PANGKALPINANG

DATA TAMBAHAN

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG SEMESTER 1 TAHUN 2026

BAGIAN ANGGARAN 005.05
483429

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkajene, Prov. Kep. Bangka Belitung



0812-3456789



www.pangkalpinang.go.id



laporan_barang_kuasa_pengguna@pangkalpinang.go.id



PANGKAL PINANG

1. Neraca Percobaan Berbasis Akrual dan Laporan Neraca Tingkat Satuan Kerja (2 Dokumen Cetak)

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

BAGIAN ANGGARAN 005.05
483429

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0812-3456789



www.pengadilan-pangkalpinang.go.id



PANGKAL PINANG

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 31/07/26 6:50 AM

Tgl Cetak : 31/07/26 9:27 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,000,000	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	6,288,920	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	19,656,971	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	6,288,920
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	1,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	34,710,650
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,670,500	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	1,999,976
0.0	391111	Ekuitas	0	22,905,623
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	270,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	690,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	1,710,500
3.0	521211	Beban Bahan	5,493,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	12,000,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	300,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	16,917,650	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	5,248,628	0
JUMLAH			69,575,669	69,575,669

Keterangan :

FINAL

Pangkalpinang, 31 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DORA NATALIA SINGARIMBUN
NIP 198112292006042015

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 31/07/26 6:50 AM

Tgl Cetak : 31/07/26 9:27 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	1,000,000	0	1,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	6,288,920	0	6,288,920	0.00
Persediaan	19,656,971	22,905,623	(3,248,652)	(14.18)
JUMLAH ASET LANCAR	26,945,891	22,905,623	4,040,268	17.64
JUMLAH ASET	26,945,891	22,905,623	4,040,268	17.64
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	6,288,920	0	6,288,920	0.00
Uang Muka dari KPPN	1,000,000	0	1,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7,288,920	0	7,288,920	
JUMLAH KEWAJIBAN	7,288,920	0	7,288,920	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	19,656,971	22,905,623	(3,248,652)	(14.18)
JUMLAH EKUITAS	19,656,971	22,905,623	(3,248,652)	(14.18)
JUMLAH EKUITAS	19,656,971	22,905,623	(3,248,652)	(14.18)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	26,945,891	22,905,623	4,040,268	17.64

Keterangan :

FINAL

Pangkalpinang, 31 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DORA NATALIA SINGARIMBUN
NIP 198112292006042015



W. PANGKAL PINANG

2. Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan Penjelasan Selisihnya

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

BAGIAN ANGGARAN 005.05
483429

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalanpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



08141



www.pptn.go.id



laporan_barang_kuasa_pengguna@pptn.go.id



3. Data/Laporan Aset Sengketa (Jika Tidak Ada Dibuat NIHIL)

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

BAGIAN ANGGARAN 005.05
483429

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0812-3333-3333



www.pangkalpinang.go.id



0812-3333-3333



BERKAS HUKUM

4. Rekapitulasi dan Rincian Transaksi Hibah Masuk dan Hibah Keluar BMN Berupa Aset Tetap dan Persediaan

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

BAGIAN ANGGARAN 005.05
483429

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung





BARANG KUASA PENGGUNA

5. Gambaran Umum Terkait Pengelolaan BMN

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

BAGIAN ANGGARAN 005.05
403429

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



011-4111111



www.pengadilan.go.id



011-4111111



BP-AHHLAK

DAFTAR LAMPIRAN

1. BA Opname Fisik (Audited)

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

BAGIAN ANGGARAN D05.05
482429

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0822-42424



www.bpkp.go.id



laporan@bpkpa.go.id